

# **ANALISIS FAKTOR TRANSPARANSI PEMERINTAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI KABUPATEN DAN KOTAMADYA DI INDONESIA**

Tantri bararoh  
Budi prayitno

Universitas Wijaya kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya  
Joo\_leo@yahoo.com

## **Abstraksi**

*Fenomena korupsi bagi masyarakat Indonesia seolah bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Hampir setiap hari media selalu memberikan informasi mengenai korupsi yang tentunya merugikan negara dan rakyat Indonesia. Derajat keterjadian korupsi yang semakin meningkat berdampak pada degradasi kualitas infrastruktur publik, merosotnya pendapatan dari sektor perpajakan, pendistorsian komposisi pengeluaran publik, kinerja pemerintah yang tidak efektif dan efisien hingga kesenjangan yang makin melebar di masyarakat. Berdasarkan fakta tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia serta mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang faktor – faktor yang mempengaruhi korupsi, maka penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris terkait dengan fenomena tersebut. Berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu yang cenderung mngambil negara sebagai obyek penelitian, penelitian ini mengambil obyek penelitian pad akota dan kabupaten di Indonesia. Dengan menggunakan analisa regresi berganda, penelitian ini mencoba untuk melihat hubungan antara transparansi pemerintahan dan tingkat pendidikan masyarakat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia.*

**Kata kunci : transparansi pemerintah, tingkat pendidikan, korupsi, pemerintahan**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Pada tingkat negara, berdasarkan peringkat *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh Transparency International (TI), negara-negara maju yang kondisi ekonominya relatif lebih stabil memiliki derajat korupsi lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Semakin tinggi CPI yang

diperoleh suatu negara menunjukkan angka keterjadian korupsi yang semakin rendah di negara tersebut. Untuk tahun 2009, dari total 180 negara yang menjadi obyek survey, negara-negara maju seperti Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura (9,2), Swedia (9,2), dan Swiss (9,0) secara berurutan menempati posisi teratas dalam perolehan CPI. Pada sisi lainnya, negara-negara berkembang seperti Somalia (1,1), Afganistan (1,3), Myanmar (1,5), Sudan (1,5), dan Irak (1,5) menempati posisi terbawah dalam perolehan CPI. Adapun Indonesia yang juga merupakan salah satu negara berkembang memiliki CPI sebesar 2,81. Posisi CPI Indonesia tersebut mengindikasikan bahwa negara ini masih dipandang sebagai negara rawan korupsi oleh para pelaku bisnis, pengamat ataupun analis negara

Kenyataan tentang melekatnya julukan negara korup pada Indonesia didukung oleh hasil riset beberapa lembaga independen yang fokus dalam permasalahan korupsi. The Partnership for Governance Reform in Indonesia's National Survey on Corruption in Indonesia, melalui hasil survey yang dilakukannya, menyatakan bahwa dari total 2.300 kepala rumah tangga dan pelaku bisnis yang menjadi obyek survey, 75% responden menyatakan bahwa korupsi menjadi hal yang lazim di area sektor publik Indonesia. Masih dalam survey yang sama, 65% responden menyatakan pernah bersinggungan secara langsung dengan praktik korupsi di Indonesia (World Bank, 2003). Hasil survey The Partnership for Governance Reform in Indonesia's National Survey on Corruption in Indonesia diperkuat dengan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga ini menyatakan bahwa selama tahun 2004 sampai tahun 2010 sebanyak 147 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Dari 33 provinsi yang ada, sebanyak 18 gubernur dan satu wakil gubernur terjerat korupsi.

Korupsi menjadi isu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia disebabkan dampak negatif yang ditimbulkan. Derajat keterjadian korupsi yang semakin meningkat berdampak pada degradasi kualitas infrastruktur publik, merosotnya pendapatan dari sektor perpajakan, pendistorsian komposisi pengeluaran publik, kinerja pemerintah yang tidak efektif dan efisien, hingga pada masalah semakin melebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat (Mauro, 1995; Chetwynd dkk., 2003). Sebagai hasil akhir dari rentetan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korup pejabat publik di Indonesia adalah tidak bisa terlepasannya sebagian masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan.

Fenomena korupsi yang ada di Indonesia, baik itu dilihat dari segi penyalahgunaan keuangan negara, ekonomi, maupun politik, bisa dianalisis dengan menggunakan principal-agent theory. Dalam konsep hubungan antara principal dan agent, terdapat jarak yang memisahkan keduanya. Jarak tersebut pada akhirnya memunculkan kondisi asimetri informasi. Kondisi yang ada adalah principal tidak

dapat mengetahui sepenuhnya kinerja agent karena agent cenderung melakukan praktik moral hazard dan adverse selection untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dalam area sektor publik, masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas kinerja pemerintah tidak dapat mengetahui secara detail kinerja dari pemerintah karena ada jarak yang memisahkan hubungan di antara keduanya. Jarak antara masyarakat dan pemerintah kemudian membuka jalan bagi pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri. Adapun kualitas pendidikan masyarakat (human capital) memerankan posisi penting dalam mereduksi korupsi karena tekanan sosial terhadap kinerja pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan masyarakat (Van Rijckeghem dan Weder, 1997).

Berdasarkan fakta tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia serta mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi, maka penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris terkait dengan fenomena tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadikan negara sebagai unit analisis penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai unit analisis adalah kabupaten dan kota di Indonesia. Pengembangan semacam ini dilakukan karena menurut Shah (2007) dalam Shah (2007) pada dasarnya setiap negara mengalami permasalahan korupsi yang spesifik. Kasus korupsi yang dialami oleh Indonesia belum tentu serupa dengan kasus yang dialami oleh negara-negara lainnya. Selain itu, penggunaan kota dan kabupaten sebagai sampel penelitian juga didasarkan pada saran penelitian dari Fisman dan Gatti (2002) yang melakukan penelitian sejenis sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disusun rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu apakah variabel-variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal, Akuntabilitas pemerintah, transparansi pemerintah, level of economic development, dan pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap korupsi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia?

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel-variabel desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah, transparansi pemerintah, level of economic development, dan pendidikan masyarakat terhadap korupsi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Hasil penelitian Hutter dan Shah (1998) menunjukkan adanya hubungan antara desentralisasi belanja dan rendahnya tingkat korupsi sebagai salah satu

indikator good governance. Sementara itu, hasil penelitian Fisman dan Gatti (2002), Freille dkk. (2008), Lessman dan Markwardt (2010), serta sebagian hasil penelitian Arian (2004) terkait dengan desentralisasi belanja dan pendapatan, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat desentralisasi suatu negara akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat keterjadian korupsi di negara tersebut. Berlawanan dengan hasil penelitian-penelitian yang dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian Treisman (2000) menegaskan bahwa tingkat keterjadian korupsi akan semakin tinggi di negara dengan bentuk pemerintahan federal. Bentuk pemerintahan federal tersebut diidentikkan dengan karakteristik desentralisasi. Hasil penelitian Treisman (2000) sejalan dengan penelitian Gerring dan Thacker (2004), Kunicová dan Rose Ackerman (2005) serta hasil studi kasus yang dilakukan oleh Rienaldi dkk. (2007) pada beberapa daerah di Indonesia (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten). Hasil studi kasus yang dilakukan Rienaldi dkk. (2007) menunjukkan bahwa kasus korupsi pejabat publik pada beberapa daerah di Indonesia semakin banyak terungkap setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia.

Sementara itu, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus, hasil penelitian Hubbard (2007) menjelaskan bahwa aktivitas pengungkapan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan mampu mereduksi tindak korupsi pada sektor pendidikan di Uganda. Aktivitas pengungkapan tersebut dilakukan melalui media (koran dan radio) serta website resmi pemerintah lokal. Pada penelitian lainnya, dengan menggunakan alat uji statistik OLS regressions, hasil dari penelitian Andersen (2009) menyatakan bahwa e-government memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi. E-government yang dimaksud adalah publikasi data-data pemerintahan dalam website resmi suatu negara. Semakin bagus e-government suatu negara menunjukkan semakin rendahnya tingkat keterjadian korupsi di negara tersebut.

Dasar pemikiran principal-agent theory adalah adanya kontrak yang menghubungkan dua belah pihak, yaitu principal dan agent (Jensen dan Meckling, 1976; Broadbent dkk., 1996). Hubungan antara principal dan agent sering disebut dengan hubungan keagenan. Principal sebagai pemilik sumber daya mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada agent untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh principal. Tujuan dari pendelegasian wewenang tersebut adalah untuk maksimalisasi keuntungan bagi principal. Selanjutnya, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam upaya maksimalisasi keuntungan, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, begitu pula dengan agent. Dalam menjalankan fungsinya, agent tidak selalu bertindak untuk

memberikan keuntungan terbaik (best interests) bagi principal. Agent cenderung berorientasi pada kesejahteraan pribadi dibandingkan dengan berorientasi pada kesejahteraan principal.

Munculnya model keagenan antara principal dan agent kemudian mengakibatkan adanya masalah asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut. Asimetri informasi muncul karena principal mengalami keterbatasan mekanisme pengendalian untuk memantau kinerja dari agent serta diperparah dengan perilaku agent yang kurang transparan dan akuntabel (Jain, 2001). Selanjutnya, menurut Shah (2007) dalam Shah (2007) masalah asimetri informasi yang muncul memungkinkan agent untuk bertindak oportunistik demi memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam kajiannya, Scott (2004) menjelaskan bahwa *institutional theory* menjadi aspek yang penting dalam menjelaskan sebuah struktur sosial, yaitu suatu proses tentang struktur, termasuk di dalamnya adalah skema, aturan, norma, serta rutinitas, yang kesemuanya itu kemudian menjadi landasan bagi perilaku sosial. Teori ini menyelidiki tentang bagaimana sebuah elemen diciptakan, disebar, diadaptasi, dan dipertahankan. Adapun yang dimaksud elemen dalam hal ini menurut Scott (2004) terdiri dari elemen budaya-kognitif, elemen normatif, dan elemen regulatif.

*Level of economic development* sebuah negara atau daerah berpengaruh dalam merubah budaya pola pikir masyarakat terhadap realitas perilaku sosial yang terbentuk disekitarnya, termasuk merubah pola pikir masyarakat terhadap tindakan korupsi oleh kelompok tertentu.

Martin Lipset sebagai pengusung teori *human capital* menyatakan bahwa masyarakat yang terdidik mencerminkan masyarakat yang produktif serta jauh dari konflik kekerasan dan penindasan (Djankov dkk., 2003; Glaeser dkk. 2004). Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi akan menjadikan suatu pemerintahan memiliki budaya dan stabilitas politik yang baik. Kecerdasan masyarakat juga mampu mereduksi kesempatan pemerintah untuk menekan rakyatnya (Djankov dkk., 2003). Pada akhirnya, kondisi masyarakat yang terdidik akan mempersempit kesempatan kelompok-kelompok tertentu untuk mempraktekkan tindakan yang menjurus kepada korupsi, seperti monopoli harga atau taktik penyuapan untuk mendapatkan *previlage* tertentu dari penguasa.

Layaknya sebuah kesatuan, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, masyarakat juga memerankan posisi penting di dalamnya. Peran penting masyarakat adalah sebagai pemonitor aktifitas pemerintah, informan dan pelapor terjadinya tindak korupsi, pengritik kinerja pemerintah, serta pihak yang juga berpotensi untuk menuntut dijatuhkannya hukuman bagi pelaku korupsi (Van

Rijckeghem dan Weder, 1997; Keen, 2000; KNKG, 2010). Untuk memainkan perannya sebagai pengontrol kinerja pemerintah, maka masyarakat harus mengenal dan bersahabat dengan pendidikan. Pendidikan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peka dan kritis terhadap kinerja pemerintah dan mempermudah penyebarluasan setiap pelanggaran yang dilakukan pemerintah (Glaeser dkk., 2004).

Tuanakotta (2010: 224) menyatakan bahwa dalam pendekatan sosiologi, definisi korupsi yang lazim dipergunakan adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Chetwynd dkk. (2003) dengan merujuk pada USAID Handbook for Fighting Corruption menyatakan bahwa korupsi meliputi penyalahgunaan unilateral oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta penyalahgunaan yang menghubungkan aktor-aktor publik dan swasta seperti penyuapan, pemerasan, menjajakan pengaruh dan penipuan.

Terkait dengan tindak korupsi yang hingga saat ini masih menjadi mimpi buruk dari sebagian besar negara di dunia, penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara telah banyak dilakukan. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut, kemudian dihasilkan beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Beberapa faktor tersebut salah satunya adalah penerapan desentralisasi fiskal (Hutter dan Shah, 1998; Treisman, 2000; Fisman dan Gatti, 2002; Arikian, 2004; Freille dkk., 2008; Lessmann dan Markwardt, 2010), Akuntabilitas pemerintah (Lederman dkk., 2001; Brewer dkk., 2007; Olken, 2007), transparansi pemerintah (Lindstedt dan Naurin, 2006; Hubbard, 2007; Andersen, 2009), level of economic development (Ades dan Di Tella, 1997; Van Rijckeghem dan Weder, 1997; Heckman dan Klenow, 1998; Treisman, 2000; Paldam, 2001; Svensson, 2005; Shabbir dan Anwar, 2007) serta pendidikan masyarakat (Ades dan Di Tella, 1997; Heckman dan Klenow, 1998; Treisman, 2000; Paldam, 2001; Svensson, 2005; Shabbir dan Anwar, 2007)

Dalam kerangka pemikiran principal-agent theory, transparansi merupakan salah satu jalan bagi principal untuk mengontrol kinerja dari agent (Lindstedt dan Naurin, 2006). Perlunya mekanisme kontrol dalam hubungan antara principal dan agent disebabkan adanya kecenderungan agent bertindak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat dengan principal disebabkan asimetri informasi di antara keduanya. Konsep transparansi berhubungan dengan ketersediaan informasi, yaitu kemungkinan untuk melihat sesuatu guna mengetahui apa yang sedang terjadi (Lindstedt dan Naurin, 2006). Layaknya seorang klien yang dapat memonitor kinerja dari penyedia jasa melalui informasi yang disediakan oleh penyedia jasa

tersebut, masyarakat juga dapat memonitor kinerja dari pemerintah melalui informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi yang dihasilkan terkait dengan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersedianya informasi maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah.

Upaya pencegahan praktik korupsi pejabat publik melalui perangkat Good Public Governance (GPG) seperti penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah juga harus didukung oleh perangkat lain, salah satunya adalah peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya bottom-up reforms dengan jalan memicu peningkatan aktivitas monitoring dan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah (Ahrend, 2000; World Bank, 2003; Lindstedt dan Naurin, 2006).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peran penting masyarakat dalam upaya mereduksi tindakan korup pejabat publik terletak pada mekanisme bottom-up reforms. Untuk memainkan perannya sebagai pengontrol kinerja pemerintah, maka masyarakat harus mengenal dan bersahabat dengan pendidikan. Pendidikan menjadi modal utama masyarakat untuk mengontrol tindakan pemerintah karena dengan pendidikan masyarakat dapat menyerap berbagai informasi tentang aktivitas pemerintahan yang disajikan oleh media masa. Dengan pendidikan, masyarakat terdorong untuk lebih peka dan kritis terhadap kinerja pemerintah dan mempermudah penyebarluasan setiap pelanggaran yang dilakukan pemerintah (Glaeser dkk. 2004).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Hartono (2010: 12) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan explanatory research adalah riset yang dilakukan untuk mencoba menjelaskan fenomena yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hartono (2010: 3) termasuk pada apa yang disebut sebagai scientific method. Scientific method adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membangun satu atau lebih hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji satu atau lebih hipotesis tersebut secara empiris (Hartono, 2010: 3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah populasi penelitian tahun 2010 adalah sebesar 483 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Peneliti untuk melakukan penelitian ini mengambil tahun 2010 sebagai tahun observasi karena data yang berhubungan dengan variabel dependen (terikat) dalam penelitian (yaitu korupsi yang diwakili oleh indeks persepsi korupsi tingkat kabupaten atau kota di Indonesia) paling banyak ditemukan pada tahun tersebut.

Selain itu, desentralisasi fiskal sendiri baru mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2001 melalui UU RI No. 25 tahun 1999 yang pada kelanjutannya disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling design, artinya sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar dapat mewakili populasinya (Sekaran, 2006: 136). Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang data dana perimbangan dan total belanja untuk tahun 2010 telah diumumkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
2. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang LKPD-nya untuk tahun anggaran 2010 telah diaudit oleh BPK-RI.
3. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang PDRB serta jumlah penduduknya untuk tahun 2010 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
4. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang data rata-rata lama sekolah masyarakatnya untuk tahun 2010 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
5. Kabupaten dan kota di Indonesia yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia.

Data dalam penelitian ini merupakan data internal atau eksternal organisasi yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen, maupun melalui publikasi informasi. Sedangkan sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian.

Adapun data dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berupa jumlah dana perimbangan dan total belanja beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2010.
2. Data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) terkait dengan opini audit BPK untuk LKPD tingkat kabupaten dan kota tahun anggaran 2010.
3. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan data rata-rata lama sekolah masyarakat untuk beberapa kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2010.



4. Data primer tentang pengumuman APBD dari masing-masing website resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian.
5. Data sekunder berupa Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia di tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Kedua variabel independen tersebut adalah transparansi pemerintah (X1), pendidikan masyarakat (X2). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi (Y).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindstedt dan Naurin (2006), transparansi diproksikan dengan indeks transparansi yang dikeluarkan oleh Word Bank untuk level negara. Komponen penyusun indeks transparansi tersebut diantaranya terfokus pada ketersediaan sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang anggaran (transparansi anggaran) serta pengimplementasian e-government. E-government sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, variabel pendidikan masyarakat diproksikan dengan rata-rata lama sekolah masyarakat di kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2008 yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan pengertian Badan Pusat Statistik Indonesia, rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi yang diproksikan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia melalui survei yang dilakukan di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Ordinary Least Squares (OLS) Regression Analysis melalui bantuan software SPSS 17 dan dengan pengujian dua ekor (two-tail test). Two-tailed test merupakan pengujian yg melibatkan dua sisi (ekor) pada kurva normal dimana pengujiannya ditujukan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan alat analisis OLS regressions yang membutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased estimator/ BLUE) dari penaksir. Adapun model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

Y = korupsi diproksi dengan IPK

X1 =transparansi pemerintah

X2 = tingkat pendidikan masyarakat

e = error term

### ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemodelan yang ditawarkan sebelumnya, berikut akan disampaikan hasil komputasi dari model tersebut:

Tabel 1

Variabel	Hasil Komputasi			
	Koefisien Regresi	Nilai t Statistik	Probabilitas (p)	Hipotesis Tertolak
Transparansi Pemerintah	0,877	4,171	4,171	H <sub>1</sub>
Tingkat Pendidikan Masyarakat	0,071	0,855	0,398	H <sub>2</sub>
Koefisien Regresi <i>Constant</i>	2,217			
R	0,603			
R <sup>2</sup>	0,364			
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,285			
Nilai F	4,581			
Nilai p dari uji F	0,02			

\*signifikan secara statistik pada  $\alpha=5\%$

Variabel Dependen: Korupsi (Diproksi dengan IPK)

Berdasarkan pemahaman tentang IPK, kemudian dapat diambil suatu landasan untuk kebutuhan justifikasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Ketika nilai F statistik serta nilai t statistik positif dan signifikan pada  $\alpha 5\%$  (nilai p dibawah 0,05) maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Dengan arti lain, variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi. Semakin tinggi variabel independen akan berdampak pada semakin tingginya perolehan nilai IPK yang selanjutnya dapat juga diartikan akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat keterjadian korupsi di suatu daerah. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai F statistik serta nilai t statistik negatif dan signifikan pada  $\alpha 5\%$  (nilai p dibawah 0,05) menunjukkan semakin tinggi variabel independen akan berdampak pada semakin rendah perolehan nilai IPK yang selanjutnya dapat juga diartikan akan berdampak pada semakin tingginya korupsi di suatu daerah.

Hasil uji keberartian model (Uji F) dalam penelitian ini menunjukkan nilai F statistik sebesar 4,581 dengan probabilitas sebesar 0,02. Untuk menyatakan semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (menolak  $H_0$ ), maka harus dihasilkan koefisien slope (parameter penelitian/  $\beta$ ) secara simultan tidak sama dengan 0 (Ghozali, 2009: 16). Koefisien slope dinyatakan secara simultan tidak sama dengan 0 ( $\neq 0$ ) ketika nilai p dari uji F lebih kecil dari 0,05. Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari uji F lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penyebab keterjadian korupsi. Dalam arti kata lain dari hasil uji F dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah, transparansi pemerintah, level of economic development, dan juga tingkat pendidikan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap korupsi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap korupsi, yaitu variabel transparansi pemerintah. Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa variabel transparansi pemerintah memiliki koefisien regresi dan nilai t statistik yang positif serta nilai probabilitas sebesar 0,00 (di bawah  $\alpha$  5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang dengan arti lain transparansi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi. Sikap pemerintah yang transparan akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat keterjadian korupsi di suatu daerah. Adapun keempat variabel independen lainnya yang terdiri dari desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah, level of economic development, serta pendidikan masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korupsi. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas dari keempat variabel tersebut yang berada di atas  $\alpha$  5%. Nilai probabilitas untuk desentralisasi fiskal sebesar 0,227, akuntabilitas pemerintah sebesar 0,150, level of economic development sebesar 0,950, serta nilai probabilitas untuk tingkat pendidikan masyarakat sebesar 0,398.

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa daerah yang pemerintahnya transparan akan cenderung memiliki tingkat keterjadian korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah yang pemerintahnya tidak transparan. Hal ini dapat dilihat dari nilai p untuk variabel transparansi pada tabel 5.2 sebesar 0,000 yang berada di bawah  $\alpha$  0,05, yang kemudian mengakibatkan  $H_0$  untuk model regresi pengaruh transparansi pemerintah terhadap korupsi dalam penelitian ini ditolak. Hasil uji regresi tentang pengaruh transparansi pemerintah terhadap korupsi dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Lindstedt dan Naurin (2006), Andersen (2009), serta hasil penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Hubbard (2007).

Pemerintah daerah yang dengan sukarela menginformasikan aktivitas pengelolaan dana APBD-nya melalui website disinyalir mempunyai itikad baik untuk memangkas jarak dan keterjadian asimetri informasi antara dirinya dengan masyarakat di daerah setempat. Mekanisme pengungkapan semacam ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berusaha untuk menutup-nutupi aktivitas pengelolaan dana publik yang diamanatkan kepadanya. Inisiatif sukarela yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengungkapkan aktivitas pengelolaan dana publik juga dapat digunakan sebagai indikator tingkat kejujuran dari pemerintah tersebut yang kemudian berpotensi menghindarkan pemerintah dari tindakan korupsi.

Salah satu kenyataan pendukung hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa transparansi pemerintah berpengaruh terhadap korupsi adalah pengalaman dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota peraih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi di tahun 2008 dari lima puluh kota dan kabupaten yang disurvei oleh Transparency International (TI) Indonesia dengan nilai IPK 6,43. Posisi Kota Yogyakarta sebagai peraih IPK tertinggi di tahun 2008 menunjukkan bahwa kota Yogyakarta dinilai oleh responden survey TI Indonesia sebagai kota yang paling rendah tingkat korupsi pejabat publiknya. Posisi ini sejalan dengan prestasi lain Pemkot Yogyakarta yang meraih penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008/9 serta salah satu penghargaan dalam E-Government Award versi Warta Ekonomi di tahun 2009 sebagai peraih website terbaik<sup>10</sup>. Pengimplementasian e-Government dalam hal ini dinilai sebagai upaya peningkatan transparansi pemerintah melalui excellent public service. Selain itu, prestasi lain dari Pemkot Yogyakarta adalah meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2010 (PIAK 2010) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai Pemerintah Kota Yogyakarta unggul dalam hal indikator peningkatan transparansi sebagai salah satu alat penggerak kegiatan anti korupsi<sup>11</sup>. Pemkot Yogyakarta dinilai sebagai pemkot yang secara intensif memobilisasi kegiatan anti korupsi dengan memangkas jalur birokrasi dan menggerakkan transparansi melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi dua arah tersebut diimplementasikan dengan jalan menggagas berbagai jenis pelayanan online melalui website resmi yang dimiliki Pemkot Yogyakarta. Beberapa pelayanan online yang disediakan tersebut contohnya adalah pengaduan masyarakat online, pelayanan perizinan online, serta pengagasan sistem pengadaan barang pemerintah online (e-procurement).

Hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keterjadian korupsi pada beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $p$  untuk variabel tingkat pendidikan masyarakat pada tabel 5.4 berada di atas  $\alpha$  0,05. Hasil tersebut mengakibatkan  $H_0$  untuk model regresi pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap korupsi dalam penelitian ini diterima. Hasil uji regresi tentang pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap korupsi dalam penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ades dan Di Tella (1997), Heckman dan Klenow (1998), Treisman (2000), Paldam (2001), Svensson (2005), serta Shabbir dan Anwar (2007). Sebaliknya, hasil uji regresi pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap korupsi dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Van Rijckeghem dan Weder (1997) dan Adsera dkk. (2000).

Tingkat pendidikan masyarakat tidak akan mampu membantu upaya mereduksi tindakan korupsi pejabat publik ketika masyarakat tersebut tidak memandang korupsi sebagai sesuatu yang mengganggu dan merugikannya. Ketika seseorang merasa nyaman dengan sesuatu, maka orang tersebut tidak akan menggugat, bahkan cenderung bersikap toleran terhadap keberadaan dari sesuatu tersebut. Begitu pula ketika masyarakat tidak merasa terganggu terhadap korupsi pejabat publik, bahkan merasa diuntungkan oleh tindakan korup pejabat publik, maka akan menjadi hal yang susah dicapai untuk mengharapkan peran serta masyarakat dalam upaya mereduksi tindakan korupsi pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil temuan KPK dalam survey yang dilakukannya yang menyatakan bahwa cara pandang masyarakat atau pengguna layanan publik di Indonesia masih permisif terhadap korupsi pejabat publik (KPK, 2009).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pejabat publik daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Faktor-faktor tersebut terdiri dari transparansi pemerintah, dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah terbukti secara empiris berpengaruh terhadap korupsi pejabat publik daerah di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil tersebut sekaligus juga memberikan bukti bahwa tingkat keterjadian korupsi pejabat publik daerah tingkat kota dan kabupaten di Indonesia berhubungan erat dengan sikap transparan dari pejabat publik di daerah yang bersangkutan. Hasil ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Lindstedt dan Naurin (2006), Andersen (2009), serta hasil penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Hubbard (2007).

Pada sisi yang lain, penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh pendidikan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil ini sekaligus memberikan bukti secara empiris bahwa tingkat pendidikan masyarakat bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keterjadian korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik daerah tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Hal tersebut juga memberikan simpulan bahwa hasil penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap korupsi di Indonesia masih bersifat inconclusive.

Adapun hasil lain dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendidikan masyarakat tidak terbukti secara empiris berpengaruh terhadap korupsi searah dengan hasil penelitian Van Rijckeghem dan Weder (1997) serta Adsera dkk. (2000).

Tidak mampunya pendidikan masyarakat dalam upaya mereduksi korupsi pejabat publik di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia seperti yang tergambar dalam hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan oleh sudah sedemikian sistematisnya korupsi melekat dalam diri lembaga sektor publik di Indonesia serta sudah bersahabatnya pejabat publik dan masyarakat dengan budaya korupsi di lingkungannya. Hal tersebut juga diperparah dengan lemahnya regulasi formal dan pengakuan terhadap norma sosial serta etika yang seharusnya dijadikan sebagai nilai dominan dalam suatu komunitas masyarakat.

## **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka terdapat saran yang bisa dipertimbangkan dan digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut meliputi penggunaan jumlah sampel penelitian, jenis data penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian, serta proksi untuk masing-masing variabel penelitian. Saran pertama adalah berhubungan dengan jumlah sampel penelitian dan jenis data penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah sampel penelitian dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang lebih banyak diharapkan mampu memberikan justifikasi hasil yang lebih akurat. Alternatif untuk mendapatkan jumlah sampel yang lebih besar bisa dilakukan melalui penggunaan jenis data panel dengan menggabungkan data antar waktu (*crosssectional*) dan jenis data runtut waktu (*time series*).

Saran selanjutnya yaitu tentang jenis data penelitian. Peneliti selanjutnya dapat memilih alternatif penggunaan jenis data primer seperti contohnya melalui media kuesioner ataupun desain eksperimen. Penelitian mungkin akan memberikan hasil penelitian yang lebih baik ketika peneliti selanjutnya menggunakan jenis data primer.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ades, A., & di Tella, R. (1997). The new economics of corruption: A survey and some new results. *Political Studies XLV*, 496-515.
- Adsera, A., Boix, C., & Payne, M. (2000). Are you being served? Political accountability and quality of government. Inter-American Development Bank Research Department Working Paper 438.
- Ahmad, E., & Tanzi, V. (2002). Managing fiscal decentralization: Overview. Dalam E. Ahmad, & V. Tanzi (Eds.), *Managing fiscal decentralization* (pp. 1-13). London: Routledge.
- Ahrend, R. (2002). Press freedom, human capital and corruption. Social Science Research Network.
- Ananda, C. F. (2002). Problems of the implementation of fiscal decentralization in regional autonomy: The case of Malang Municipality and Trenggalek District. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland.
- Andersen, T. B. (2009). E-government as an anti-corruption strategy. *Information Economics and Policy*, 21, 201–210.
- Andvig, J. C., Fjeldstad, O.H., Amundsen, I., Sissener, T., & Soreide, T. (2000). Research on corruption a policy oriented survey. Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
- Arikan, G. (2004). Fiscal decentralization: A remedy for corruption?. *International Tax and Public Finance*, 11, 175–95.
- Azfar, O. (2007). Disrupting corruption. Dalam A. Shah (Ed.), *Performance accountability and combating corruption* (pp. 255-283). Washington DC: The World Bank.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Corruption and decentralization of infrastructure delivery in developing countries. <http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-1251814020192/bardhan1.pdf>. (Diakses Tanggal 7 November 2010).

- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralization, corruption and government accountability. Dalam S. Rose-Ackerman (Ed.) Handbook of economic corruption (pp. 161-188). Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Besley, T., & Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public goods: A political economy approach. *Journal of Public Economics*, 87, 2611-2637.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal decentralization in developing countries: An overview. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brewer, G. A., Choi, Y., & Walker, R. M. (2007). Accountability, corruption and government effectiveness in Asia: An exploration of world bank governance indicators. *International Public Management Review, Electronic Journal*, Vol. 8, Issue 2.
- Broadbent, J., Dietrich, M., & Laughlin, R. (1996). The development of principalagent, contracting and accountability relationships in the public sector: Conceptual and cultural problems. *Critical Perspectives on Accounting* 7, 259-284.
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (2003). Control and legitimation in government accountability processes. *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 14, 3- 48.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. <http://www.u4.no/document/literature/corruption-and-poverty.pdf>. (Diakses Tanggal 15 September 2010).
- Christensen, Z., Nielsen, R., Nielson, D., & Tierney, M. (2011). Transparency squared: The effects of aid transparency on recipients corruption Levels. Paper prepared for the 2011 Meeting of the International Political Economy Society, Cambridge, Massachusetts.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods*. Budijanto, D. Djunaedi, & D. Sihombing (Penerjemah). Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2004). *Blue Print Sistem Aplikasi E-Government*.
- DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. 1983. The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Field. Dalam P.J. DiMaggio & W.W Powel (Eds.). *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (p. 63-82). The University of Chicago Press. Chicago.
- Djambhuri, A. 2009. A Case Study Of Governmental Accounting And Budgeting Reform At Local Authority In Indonesia: An Institutional Perspective. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universiti Sains Malaysia.



- Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003). The new comparative economics. *Journal of Comparative Economics*. 31:4, 595–619.
- Dye, K. M. (2007). Corruption and fraud detection by Supreme Audit Institutions. Dalam A. Shah (Ed.), *Performance accountability and combating corruption* (pp. 303-322). Washington DC: The World Bank.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2001). Concept of fiscal decentralization and worldwide overview. *International Symposium Quebec Commission on Fiscal Imbalance*, September 13 and 14.
- Elim, M. A. (2007). Hubungan Indikator keuangan, Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial: Analisis terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta). Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: evidence across countries. *Journal of Public Economics* 83, 325-345.
- Freille, S. Haque, M., & Kneller, R. (2008). Federalism, decentralisation, and corruption. *Social Science Research Network*.
- Gerring, J. & Thacker, S. (2005). Do neoliberal policies deter political corruption? *International Organization*, 59, 233–54.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A.. (2004). Do institutions cause growth? *Journal of Economic Growth*. 9:3, 271–303. Governmental Accounting Standard Board. *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting*.
- Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of accountability in the new public sector. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 6, No. 3, 52-67.
- Hartono, J. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Heckman, J. J., & Klenow, P. (1998). Human capital policy. Dalam M. Boskin (Ed.). *Policies to Promote Capital Formation*. Stanford, Calif: Hoover Institution.
- Herzfeld, T., Weiss, C. (2002). Corruption and legal (in)effectiveness: A empirical investigation. *European Journal of Political Economy*, Vol. 19, 621-632.
- Hubbard, P. (2007). Putting the power of transparency in context: Information's role in reducing corruption in Uganda's education sector. *Center for Global Development Working Paper No. 135*, December.

- Huther, J., & Shah, A. (1998). Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization. World Bank Policy Research Working Paper, no. 1894.
- Jain, A. K. (2001). Corruption: A review. *Journal of Economic Surveys*, Vol. 15 No. 1.
- Javaid, U. (2010). Corruption and its deep impact on good governance in Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 48, No. 1, Summer, 123-134.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). The theory of the firm : Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3(4), 305-360.
- Joaquin, E. T. (2004). Decentralization and corruption: The bumpy road to public sector integrity in developing countries. *Public Integrity*, Summer, Vol. 6 No. 3, 207-219.
- Kaufman, D. (2005). Myths and realities of governance and corruption. World Bank Governance Program.
- Kawedar, W. (2010). Opini audit dan sistem pengendalian intern (Studi kasus di Kabupaten PWJ yang mengalami penurunan opini audit). <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/148/90>. (Diakses Tanggal 6 Februari 2011)
- Keen, E. (2000). Fighting corruption through education. Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI) Papers, No. 1.
- Khan, M. H. (2006). Determinants of corruption in developing countries: The limit of conventional economic analysis. Dalam S. Rose-Ackerman (Ed.) *Handbook of economic corruption* (pp. 216-244). Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Kolstad, I., & Fjeldstad, O. H. (2006). Fiscal decentralisation and corruption: A brief overview of the issues. U4 ISSUE: 3. Komisi Nasional Kebijakan Governance. 2010. Konsep Pedoman Good Public Governance. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2008 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik.
- Kunicová, J., & Rose-Ackerman, S. (2005). Electoral rules and constitutional structures as constraints on corruption. *British Journal of Political Science*, 35(4), 573–606.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2001). Public sector financial disclosure on the internet: A study of New Zealand Local Authorities., Discussion Paper No. 92, Commerce Division Lincoln University.

- Lederman, D., Loayza, N., & Soares, R. R. (2001). Accountability and corruption political institutions Matter. World Bank Working Paper no. 2708.
- Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development* Vol. 38, No. 4, 631-646.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2006). Transparency againts corruption: A crosscountry analysis. Social Science Research Network.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu srana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1, Mei.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*. August.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, vol 83, 340-63.
- Natasari, D. (2007). Pengaruh Derajat Desentralisasi dan Pendapat Auditor Tahun Sebelumnya Terhadap Prediksi Pendapat Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, vol. 115, no. 2.
- Paldam, M. (2001). The cross-country pattern of corruption: economics, culture and the seesaw dynamics. *European Journal of Political Economy*, Vol. 18, 215-240.
- Panizza, U. (2001), Electoral rules, political systems, and institutional quality. *Economics and Politics*, 13(3), 311-42.
- Patton, J. M. (1992). Accountability and governmental financial reporting. *Financial Accountability and Management*, vol. 8, issue 3, September, 165-180.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Lampiran III Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Tulisan Dipresentasikan dalam 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin. 22-25 Juli.
- Renstcheler, R. & Potter, B. (1996). Accountability versus artistic development: A case for non-profit museums. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, vol. 9, no. 5, 100-113.

- Riduwan, E., & Kuncoro, A. (2008). Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path analysis). Bandung: Alfabeta.
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi: Studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah. Justice For The Poor Project, Bank Dunia. 104
- Scott, W. R. (1987). The adolescence of institutional theory. *Administrative Science Quarterly*, 32, 493-511.
- Scott, W. R. (2004). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. Dalam K. G. Smith & M. A. Hitt (Eds.). *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, Oxford UK: Oxford University Press.
- Sekaran, U. (2007). *Research Methods For Business*. K. M Yon (Penerjemah). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Shabbir, G., & Anwar, M. (2007). Determinants of corruption in developing countries. *The Pakistan Development Review*, 46: 4 Part II (Winter), 751-764.
- Shah, A. (2007). Tailoring the fight against corruption to country circumstances. Dalam A. Shah (Ed.), *Performance accountability and combating corruption* (pp. 233-254). Washington DC: The World Bank.
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi implementasi e-government pada situs web pemerintah daerah di Indonesia : Prespektif content dan manajemen. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf>. (Diakses Tanggal 13 Januari 2011).
- Soudry, O. (2006). A principal-agent analysis of accountability in public procurement. [http://www.ipppa.org/IPPC2/BOOK/Chapter\\_19.pdf](http://www.ipppa.org/IPPC2/BOOK/Chapter_19.pdf). (Diakses Tanggal 13 Januari 2011).
- Supratikno. (2009). Nasionalisme dan kebangsaan di era desentralisasi. [www.psp.ugm.ac.id](http://www.psp.ugm.ac.id). (Diakses Tanggal 22 Mei 2010).
- Svensson, J. (2005). Eight questions about corruption. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 19, Number 3, Summer, 19-42.
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world. *IMF Staff Papers*, Vol. 45, No. 4, December, 559-594.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics* 76, 399-457.
- Treisman, D. (2007). What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? *Annual Review of Political Science* 10: 211-244.

- Tirole, J. (1986). Hierarchies and bureaucracies: On the role of collusion in organizations. *Journal of Law Economics and Organization* 2 (2), 181– 214.
- Tippett, J., & Kluvers, R. (2010). Accountability and information in local government. *World Journal of Management*, vol. 2, no. 3, September, 22- 33.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 3874.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Nomor 66.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Nomor 126.
- Van Rijckeghem, C., & Weder, B. (1997). Corruption and the rate of temptation: Do low wages in the civil service cause corruption? IMF Working Paper, WP/97/73.
- Waluyo, J. (2007). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia. Makalah disampaikan pada Parallel Session IA : Fiscal Decentralization, 12 Desember.
- Widhiyanto, I. (2008). Fiscal decentralization and Indonesia regional income disparity (1994-2004). *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober, 19-53.
- World Bank. (2003). *Combating Corruption in Indonesia Enhancing Accountability for Development*. East Asia Poverty Reduction